



► **UPAH BURUH**

# UMP DIY Resmi Rp1,57 Juta

**JOGJA**—Upah Minimum Provinsi DIY dan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-DIY resmi diketok. Keputusan tersebut diambil setelah Pemda menggelar rakor penetapan UMP dan UKM di Gedung Gadri, kompleks Kepatihan, Senin (29/10).

Sunartono  
[sunartono@harianjogja.com](mailto:sunartono@harianjogja.com)

Kepala Disnakertrans DIY Andung Prihadi mengatakan UMP DIY 2019 telah ditetapkan sebesar Rp1,57 juta. Adapun UMK Kota Jogja sebesar Rp1,84 juta, Sleman Rp1,70 juta, Bantul Rp1,64 juta, Kulonprogo Rp1,61 juta dan Gunungkidul Rp1,57 juta. Proses penetapan UMP, kata dia, telah melalui beberapa pendekatan, di antaranya adalah keterlibatan tripartit (perusahaan, pemerintah dan buruh).

Andung mengatakan besaran UMP dan UKM 2019 di DIY diputuskan dengan dasar hukum UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan; PP No.78/2015 tentang Pengupahan; Instruksi Presiden No.9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja; dan Permenakertrans No.7/2013 tentang Upah Minimum.

Proses penetapan UMP pun, kata dia, telah melalui beberapa pendekatan, antara lain keterlibatan tripartit (pemerintah, perusahaan, dan buruh).

Terlebih berdasarkan regulasi yang berlaku, pihak yang berwenang menyurvei soal kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi komponen penting penetapan upah minimum adalah Dewan Pengupahan.

► Proses penetapan UMP telah dilakukan dengan beberapa pendekatan.  
► Pemda DIY bakal mengubah metode lain untuk menghitung upah minimum 2020 mendatang.



## UPAH MINIMUM RESMI DIKETOK



► Upah Minimum Provinsi DIY **Rp1,57 juta.**

### UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DIY

► Kota Jogja	: Rp1,84 juta.
► Sleman	: Rp1,70 juta.
► Bantul	: Rp1,64 juta.
► Kulonprogo	: Rp1,61 juta.
► Gunungkidul	: Rp1,57 juta.

### FAKTA-FAKTA UPAH MINIMUM PROVINSI

- 1 Ditetapkan dengan rumus yang sudah diatur dalam PP No.78/2015.
- 2 Harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi.
- 3 Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi didasarkan pada peninjauan kebutuhan hidup layak.

### FAKTA-FAKTA UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

- 1 Nilainya harus lebih besar dari upah minimum provinsi yang bersangkutan.
- 2 Ditetapkan gubernur atas saran dan rekomendasi bupati/wali kota dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
- 3 Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi didasarkan pada peninjauan kebutuhan hidup layak.

► Lebih Lengkap Halaman 16

Sumber: Dolah

## UMP DIY...

"Memang benar, nyatanya masih ada kelompok lain yang menyurvei [angka KHL] dengan hasil angka upah minimum yang lebih tinggi. Itulah sebabnya, Gubernur berharap pada 2020 ada penyesuaian," ucap dia.

### Metode Baru

Pemda DIY akan merekomendasikan penggunaan metode lain saat menyurvei KHL pada proses penetapan upah minimum 2020 mendatang. Hal itu semata-mata agar besaran upah minimum provinsi (UMP)

DIY tidak jadi yang paling rendah seperti yang terjadi tahun 2019. "Metode survei itu perlu diubah. Kalau acuannya harga pangan, di DIY kan harga pangannya terlalu murah," ujar dia.

Untuk itu, dalam proses penetapan UMP dan UMK 2020, komponen nonpangan bakal dikaji ulang. "Kami bersama pemkab pemkot merumuskan dengan metode yang lebih dinamis," ucapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Irsyad Ade

Irawan mengatakan UMK di DIY yang berlaku saat ini, menurut kalangan buruh, tidak berpihak pada kesejahteraan mereka.

Dia mengatakan berdasarkan survei KHL yang dilakukan oleh Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) DIY di lima kabupaten/kota di DIY, tahun ini besaran KHL Jogja adalah sekitar Rp2,9 juta; Sleman sekitar Rp2,8 juta; Bantul sekitar Rp2,7 juta; Kulonprogo sekitar Rp2,5 juta; dan Gunungkidul sekitar Rp2,4 juta.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005